

# Mendidik Polisi-Tentara Jujur dan Humanis



## AKHIR-AKHIR

ini cukup banyak kasus terkait oknum anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Terbaru, terjadi penembakan dalam penggerebekan arena sabung ayam oleh

oknum TNI terhadap anggota kepolisian di Lampung. Belum lagi sederet kasus dan skandal yang masih terasa segar dalam ingatan publik.

Bagaimana membenahi institusi Polri secara komprehensif? Masyarakat rindu akan sosok polisi dan tentara jujur dan humanis. Lantas, bagaimana mencetak sosok polisi yang jujur dan humanis itu?

## Rekrutmen

Sebuah organisasi atau lembaga dibangun atas personel dengan karakter tertentu. Proses rekrutmen menjadi kunci perbaikan kondisi lembaga, termasuk Polri. Input calon anggota baru yang bermutu diharapkan membawa angin segar.

Ada dua hal yang patut kita perhatikan dalam proses rekrutmen. Pertama, akuntabilitas kepada publik. Memang benar, di atas kertas, tiada biaya yang harus dikeluarkan calon anggota Polri. Akan tetapi, praktik di lapangan bisa berbeda. Penulis sendiri mendengar kesaksian, ada oknum anggota tim seleksi calon anggota Polri yang bisa meloloskan asal diberi suap.

Kedua, kualifikasi calon pendaftar perlu ditingkatkan. Benar bahwa tugas polisi dan tentara menuntut fisik yang prima. Tetapi, tugas polisi dan tentara kiwari semakin berat karena berhadapan dengan kompleksitas kehidupan masyarakat era digital. Rasa-rasanya wajar bila kita mengharapkan anggota Polri setidaknya lulus perguruan tinggi.

Mengapa lulus perguruan tinggi menjadi syarat yang layak dipertimbangkan? Memang tidak ada jaminan seratus persen bahwa lulusan perguruan tinggi akan lebih baik dari lulusan sekolah menengah atas, tetapi kematangan pribadi dan intelektual seorang lulusan perguruan tinggi diandaikan lebih maju dibandingkan lulusan sekolah menengah atas.

Masa perkuliahan yang ditempuh seseorang selama beberapa tahun menjadi wahana pematangan kepribadian dan intelektualitas. rekrutmen Polri dan TNI tetap

## Bobby Steven

perlu membuka ruang bagi calon potensial yang terkendala biaya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

## Pendidikan Humanis

Solusi atas perilaku koruptif dan otoriter oknum anggota Polri ialah pendidikan dan pembinaan humanis sejak dini. Driyarkara (1913-1967) mengemukakan, orang yang pintar tetapi tanpa kesusilaan hanya akan *minteri* (menyalahgunakan kepandaian untuk memperdaya sesama).

Driyarkara mengemukakan empat ciri humanisme. Pertama, kepekaan budaya. Kepekaan ini terwujud dalam sikap menghargai perbedaan. Kedua, kepekaan sejarah. Ketiga, kreativitas filosofis, yang tampak dalam kemampuan memprakarsai terobosan. Keempat, keunggulan akademik dan kepekaan terhadap keadilan.

Sudahkah pendidikan calon anggota Polri mengakomodasi keempat unsur pendidikan humanis tersebut? Ataukah pendidikan calon anggota Polri setakat ini masih ditandai pendekatan senioritas, otoritatif, dan terpisah dari realitas masyarakat?

Sastrapratedja (2013) menandakan, pendidikan adalah pembangunan manusia. Dalam konsep Yunani, pendidikan ialah *paideia* (pendidikan anak) yang diadopsi orang Romawi menjadi pendidikan humanis (humanitas). Pendidikan yang mendasarkan diri pada humanisme ini disebut sebagai humanisasi, yakni proses pemanusiaan terus-menerus.

Jika ingin mencetak polisi jujur dan humanis, pendidikan harus mengasah calon polisi dan tentara untuk menyatu dengan suka-duka masyarakat kecil. Pengalaman tinggal bersama rakyat kecil dalam *live-in* dan proyek sosial di rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi narkoba sebaiknya menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah polisi kita.

## Pembinaan Suara Hati

Pendidikan calon anggota Polri dan TNI tidak boleh hanya berfokus pada aspek

intelektual dan teknis belaka. Muara dari pendidikan dan pembinaan seharusnya ialah pembinaan suara hati (*conscience*).

Setiap anggota Polri dan TNI perlu memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara hati nurani diri sendiri dan sesama insan. Ia seharusnya sadar, ia berasal dari tengah masyarakat dan wajib menjadi pelayan masyarakat. Ia tidak berada jauh di atas hukum dan masyarakat. Ia tidak boleh dipaksa atasan atau siapa pun untuk mengingkari hati nuraninya.

Pendidikan suara hati ini antara lain dapat diasah dengan olah rohani dan olah kepribadian. Peran pemuka agama, psikolog, dan pamong dalam pembinaan anggota Polri dan TNI perlu diperluas. Tujuannya ialah agar setiap anggota kepolisian sungguh memiliki pendamping lintas keilmuan dalam pengembangan humanisme.

Wasana kata, menyitir Paus Fransiskus, ada banyak pohon di hutan yang tumbuh subur, tetapi, tidak banyak orang yang memuji. Celakanya, saat satu pohon roboh di tepi jalan, semua orang mencaci.

Ada banyak anggota Polri dan TNI yang sungguh melayani, namun jarang dipuji. Hanya saja, ketika ada oknum berulah, warga pun resah. Semoga Polri dan TNI berbenah diri sehingga mendapatkan kembali kepercayaan publik. Jika semakin banyak polisi dan tentara jujur dan humanis, hidup kita pun bertambah manis. (\*)-d

\*)Dr Bobby Steven, Dosen Universitas Sanata Dharma.

## Pojok KR

Ratusan ribu warga AS demo Trump.

- Bersiap dimakzulkan.

\*\*\*

Pendirian posko darurat sampah efektif halau pelanggar.

- Pelaku cukup dibina, tak perlu ditangkap.

\*\*\*

Idul Fitri 2025, angka mudik dan balik meningkat.

- Pengamanan juga perlu ditingkatkan.

*Berab*

## TAJUK RENCANA

### Tuntaskan Soal Sampah di Yogya

**KRISIS** sampah yang melanda Kota Yogyakarta belakangan ini mulai teratasi secara bertahap. Pemerintah Kota Yogya membuat berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan sampah. Baru-baru ini Pemkot Yogya, melalui Saprol PP dan Limmas, mendirikan posko darurat sampah di beberapa titik untuk mengawasi dan menindak pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Posko ini dirasa penting, mengingat masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, terutama di tepi jalan, sehingga merusak wajah Kota Yogya, menimbulkan bau tak sedap dan mengundang berbagai penyakit.

Sejauh ini keberadaan posko darurat sampah cukup efektif mengurangi aktivitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mereka yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dibawa ke posko untuk selanjutnya diberi pembinaan. Bahkan, Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo mengatakan, petugas masih kurang tegas, dan masih melankolis. Karenanya ia memerintahkan petugas untuk menangkap dan membawa pembuang sampah liar ke Posko Saprol PP untuk diberi pembinaan, namun tak boleh ada kekerasan maupun perlakuan yang tidak manusiawi (KR 7/4).

sampah sembarangan, seperti di jalan, sungai adalah melanggar Perda, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring), berupa denda dalam jumlah tertentu. Hal ini sudah diterapkan di Yogyakarta. Mereka yang kedapatan membuang sampah sembarangan, diproses verbal hingga kasusnya diajukan ke pengadilan, namun pelaku pembuang sampah tidak ditahan karena tindakannya bersifat tipiring. Cara seperti ini sebenarnya cukup efektif karena akan membuat pelaku berpikir ulang untuk melakukan hal sama di kemudian hari.

Seiring didirikannya posko darurat sampah, langkah yang diterapkan petugas bersifat persuasif, yakni memberi pembinaan kepada pembuang sampah sembarangan tanpa memprosesnya hingga pengadilan. Pembinaan ini masih diteruskan hingga tingkat RT atau RW. Kalau kita cermati, mekanisme pembinaan seperti ini sesungguhnya merupakan bentuk pengukuhan sosial. Mengapa? Pelaku pembuang sampah akan merasa malu ketika ditangkapi petugas kemudian dibawa ke Posko, belum lagi masih dibawa ke pengurus RT atau RW untuk dibina. Sanksi sosial ini tidak lebih ringan dibandingkan sanksi administratif lewat pengadilan.

## Perang Dagang, Ancaman Terhadap Eksistensi WTO

SEBAGAI-



MANA diberitakan, Pemerintah

Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Trump, secara sepihak menaikkan *tariff* (pajak masuk) atas produk-produk impor dari berbagai negara,

yang berlaku efektif mulai 5 April 2025. Kebijakan AS tersebut berpotensi memicu terjadinya perang dagang (*trade war*) baru. Negara-negara yang terkena dampak kebijakan AS akan membalas dengan tindakan serupa. Hal ini akan menyebabkan negara-negara mengambil tindakan unilateral yang bersifat proteksionis guna melindungi kepentingan ekonomi masing-masing. Dengan demikian, negara-negara akan meninggalkan mekanisme multilateral berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati, termasuk Persetujuan *the World Trade Organization* (WTO).

Persetujuan WTO yang mulai berlaku 1 Januari 1995 semula diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan perdagangan internasional yang adil dan memberi keuntungan kepada semua anggotanya, baik negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang dan yang masih tertinggal. Sebagai perangkai peraturan, WTO

Triyana Yohanes

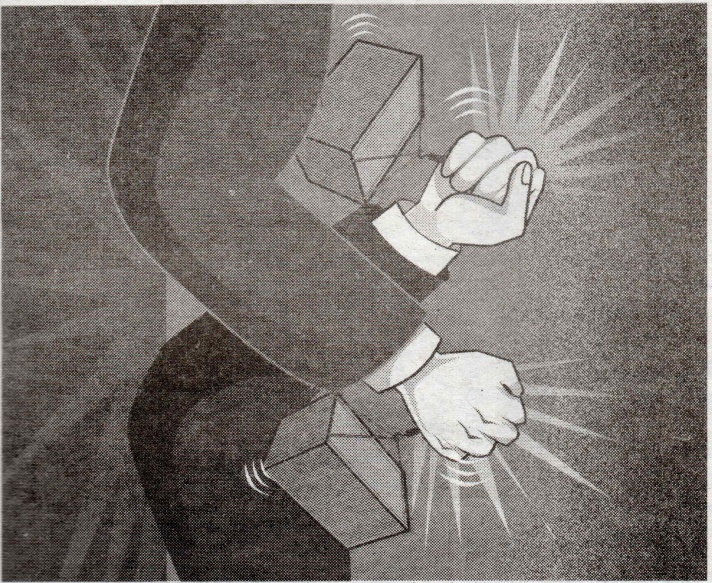
semua anggota WTO dilarang mengenakan *tariff* lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan dalam jadwal penurunan *tariff* (*consolidated tariff schedule*).

Tindakan menaikkan *tariff* sepihak oleh AS, yang kemungkinan akan dibalas dengan tindakan serupa oleh negara-negara yang terkena dampak, akan menyebabkan negara-negara anggota WTO melanggar kesepakatan penurunan *tariff* WTO. Lebih lanjut, negara-negara anggo-

al serta penyelesaian sengketa didasarkan pada aturan hukum yang disepakati bersama. Ketidaktepatan aturan WTO, berpotensi menyuburnya WTO.

Meskipun perang dagang saat ini sarakat internasional mungkin mengingat kembali krisis ekonomi organisasi pengatur hubungan ekonomi/perdagangan dunia di awal - pertengahan abad 20. Krisis ekonomi proteksionis yang menyebabkan perdagangan internasional tidak berjalan lancar serta pertumbuhan ekonomi dunia terhambat. Situasi ini diperturburk dengan terdapatnya Perang Dunia II, yang bahkan Dunia mengalami ekonomi terparah dalam sejarah manusia.

KR-JOKO SANTOSO



Untuk mengatasi kondisi ini dunia tersebut, menjelajahi langkahnya Perang Dunia II, yang bahkan Dunia mengalami ekonomi terparah dalam sejarah manusia. Untuk mengatasi kondisi ini dunia tersebut, menjelajahi langkahnya Perang Dunia II, yang bahkan Dunia mengalami ekonomi terparah dalam sejarah manusia.